

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era informasi saat ini, ketersediaan informasi yang dapat diakses secara on-line meningkat tajam. Situs dipandang sebagai sebuah media yang dapat menyediakan informasi secara *up-to-date* serta dapat membantu meningkatkan publikasi bagi sebuah organisasi. Banyak situs yang ada saat ini tidak memperhatikan kriteria pembuatan situs yang baik dan benar, meskipun panduan kriteria untuk membuat situs yang baik telah beredar gratis. Keadaan seperti ini juga banyak ditemukan di situs milik pemerintah, di mana pemerintah sebenarnya dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pemanfaatan situs oleh pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat memberikan kontribusi yang sangat besar dalam hal efisiensi proses bisnis. Layanan untuk masyarakat berbasis teknologi informasi sering juga disebut *electronic government* atau biasa disingkat dengan nama *e-Government*. Layanan pemerintah berbasis elektronik ini harus bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk orang cacat dan manula. Data menyebutkan jumlah orang cacat di Indonesia pada tahun 2009 mencapai 3,6 juta orang[1]. Mereka juga termasuk warga negara Indonesia yang mempunyai hak untuk mengakses situs pemerintah sama dengan warga negara Indonesia yang lainnya.

Situs pemerintah daerah merupakan ujung tombak yang utama dalam pengembangan *e-Government*[2]. Diperlukan suatu evaluasi yang dilakukan secara berkala agar pengembangan situs *e-Government* tidak mengalami stagnansi. Evaluasi dan pemeringkatan situs *e-Government* yang telah diselenggarakan, seperti PeGI dan Warta eGov[3][4] diharapkan dapat menjadi pemicu bagi pemerintah daerah untuk segera berbenah dalam terus mengembangkan situs *e-Government* menjadi lebih baik. Perbedaan metode evaluasi yang digunakan dalam penelitian dapat saling menutupi kelebihan dan kekurangan dari suatu metode evaluasi lainnya.

Metode evaluasi situs *e-Government* banyak ragamnya mulai dari skala Internasional seperti evaluasi situs *e-Government* yang dilakukan dari lembaga atau organisasi Internasional semacam: *e-Government Readiness Index 2008* yang dilakukan oleh *United Nations Department of Economic and Social Affairs* (UNDESA) yang menempatkan Indonesia di peringkat 106 dari 182 negara pada tahun 2008; evaluasi yang dilakukan oleh Brown University yang menempatkan Indonesia berada di peringkat 160 dari 198 negara pada tahun 2007. Metode evaluasi yang digunakan yaitu dengan mengambil beberapa parameter rekomendasi lembaga Internasional yang menangani *World Wide Web* (WWW) yaitu *accessibility* dan *usability*, keberadaan publikasi dan database, keberadaan kebijakan suatu negara, kebijakan keamanan serta nomer telepon yang dapat dihubungi[5]. Sedangkan metode evaluasi skala nasional adalah PeGI dan Warta eGov.

Di Indonesia, berdasarkan Inpres No.3 Tahun 2003, evaluasi diperlukan agar tujuan strategis *e-Government* dapat berjalan secara efektif. Pembuatan situs di setiap lembaga merupakan tingkat pertama yang harus dilalui dari empat tingkat pengembangan *e-Government* yang ada. Empat tingkat pengembangan situs *e-Government* adalah :

- Tingkat 1 – Persiapan, meliputi:
 - Pembuatan situs informasi di setiap lembaga
 - Penyiapan SDM
 - Penyiapan sarana akses yang mudah, misalnya menyediakan sarana Multipurpose Community Center, Warnet, SME Center, dll.
 - Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun publik.
- Tingkat 2 – Pematangan, meliputi:
 - Pembuatan situs informasi publik interaktif.
 - Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.
- Tingkat 3 – Pemantapan, meliputi:
 - Pembuatan situs transaksi pelayanan publik
 - Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain

- Tingkat 4 – Pemanfaatan, meliputi:
 - Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2B, G2G dan G2C yang terintegrasi.

Masih berdasarkan Inpres No.3 Tahun 2003, situs pemerintah, baik pusat maupun daerah, secara bertahap harus ditingkatkan menuju tingkat 4 yaitu tahap pemanfaatan. Upaya untuk menaikkan tingkatan situs memerlukan dukungan dari berbagai aspek agar tidak mengalami kegagalan sehingga menimbulkan pemborosan serta menghilangkan kepercayaan masyarakat. Untuk menghindari hal tersebut diperlukan sejumlah pengaturan, antara lain :

- Standar kualitas dan kelayakan situs pemerintah bagi setiap tingkatan perkembangan di atas.
- Peraturan tentang kelembagaan dan kewenangan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan transaksi informasi yang dimiliki pemerintah.
- Persyaratan sistem manajemen dan proses kerja serta sumber daya manusia yang diperlukan agar situs pemerintah dapat berfungsi secara optimal dan berkembang ke tingkat yang lebih tinggi.

Pemerintah, dalam hal ini melalui Departemen Komunikasi dan Informatika telah mensosialisasikan Inpres No.3 Tahun 2003 mengenai kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-Government* [2] yang berisi :

- Panduan pengembangan infrastruktur portal pemerintah
- Panduan manajemen sistem dokumen elektronik
- Panduan penyusunan rencana induk pengembangan *e-Government* lembaga pemerintah
- Panduan penyelenggaraan situs web pemerintah daerah
- Panduan tentang pendidikan dan pelatihan SDM *e-Government*

Panduan di atas tersedia secara bebas dan dapat diikuti oleh pemerintah daerah maupun pusat dalam mengembangkan *e-Government* di masing-masing unit kerjanya sehingga dapat naik ke tahap selanjutnya dalam tingkat pengembangan situs *e-Government*.

1.2. Permasalahan

Dari latar belakang, terlihat penting adanya evaluasi berkala situs web pemerintah, agar tujuan strategis *e-government* dapat berjalan secara efektif. Dalam melakukan evaluasi situs dapat dilakukan dengan menggunakan suatu metode dimana antara metode satu dan lainnya bersifat saling menutupi kelebihan dan kekurangannya. Adanya panduan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat dalam hal ini diwakili oleh Departemen Komunikasi dan Informatika tahun 2003 dapat dijadikan suatu metode evaluasi situs web *e-Government* dimana saat penelitian ini berlangsung belum ada evaluasi secara lebih mendalam mengenai sejauh mana penerapan panduan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika dalam situs *e-Government* pemerintah daerah. Dengan melakukan penilaian dan pengukuran penerapan rekomendasi tersebut dengan dilakukan pula pemeringkatan *e-Government* untuk tingkat nasional, propinsi dan kota/kabupaten.

1.3. Pertanyaan Penelitian (*Research Question*)

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka fokus penelitian ini adalah mengetahui peringkat situs web pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan rekomendasi Departemen Komunikasi dan Informatika dengan pertanyaan penelitian adalah:

Bagaimana metode pemeringkatan situs web pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan rekomendasi Departemen Komunikasi dan Informatika?

Bagaimana urutan peringkat situs web pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan rekomendasi Departemen Komunikasi dan Informatika?

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Materi yang akan dibahas pada penelitian evaluasi situs *e-Government* Pemerintah Daerah tingkat I (propinsi) dan tingkat II (kota/kabupaten) di Indonesia yang tersebar di 33 propinsi di Indonesia, dengan parameter rekomendasi situs web pemerintah daerah dari Departemen Komunikasi dan Informatika yang telah diuraikan berdasarkan studi literatur menjadi 14 parameter.

Indikator penilaian mengacu kepada studi literatur, penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK).

1.5. Tujuan dan Manfaat

Hasil evaluasi dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peringkat situs web pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan rekomendasi dari Departemen Komunikasi dan Informatika pada situs *e-Government* pemerintah daerah Indonesia. Hasil peringkat ini dapat memberikan gambaran dan memberikan data terbaru mengenai kondisi situs *e-Government* pemerintah daerah di Indonesia saat ini kepada pemerintah pusat berdasarkan rekomendasi yang telah ditetapkan. Selain itu, bagi pemerintah daerah hasil penelitian juga dapat dijadikan masukan sebagai bahan evaluasi mengenai kelebihan dan kekurangan situs *e-Government* mereka saat ini berdasarkan rekomendasi dari Departemen Komunikasi dan Informatika.

Manfaat yang diambil dari hasil evaluasi penelitian yang sedang dilakukan saat ini adalah :

1. Pemerintah daerah dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan situs web *e-Government* di masa yang akan datang sehingga menjadi lebih baik sesuai dengan standar yang direkomendasikan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika.
2. Pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Komunikasi dan Informatika adalah sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi kembali kelayakan rekomendasi yang telah dikeluarkan. Semua manfaat ini pada akhirnya hanya untuk satu tujuan yaitu mempermudah masyarakat dalam

mengakses situs web pemerintah dalam rangka memperoleh informasi dan layanan publik lainnya.

